

Abdurrahman Wahid's Thought about Democracy in 1974-2001

Yessyca Yunitasari^a, Sugiyanto^b, Kayan Swastika^c

^a History Education Program, Jember University. Email: yessycayunita@gmail.com

^b History Education Program, Jember University. Email: sugiyanto@unej.ac.id

^c History Education Program, Jember University. Email: kayanswastika@unej.ac.id

Abstract

This study aims to analyze Abdurrahman Wahid's thought about democracy including what the factors of his idea in realizing democracy. The method used in this study is historical research method. The result showed that because democratic values haven't run well, so Abdurrahman Wahid want to implement democracy in the domain of social, political, and economic. According to Abdurrahman Wahid, a democratic state when equalised all citizens before the law, upholds sovereignty law, free stating opinion, apply function checks and balance, and give priority to the welfare. The conclusion is thought Abdurrahman Wahid about democracy influenced by the sociocultural, education, and political experienced, who good synergy, until formed the idea of democracy. This research is expected to be reference for the community to apply the values of democracy in order unites the various interests and the diversity of Indonesian peoples.

Keywords: Abdurrahman Wahid, political thought, and democracy.

PENDAHULUAN

Demokrasi telah dikenal di Indonesia sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Para pendiri bangsa, seperti Sukarno, Hatta, dan Sjahrir telah merumuskan berbagai model demokrasi. Mulai dari demokrasi yang diambil dari negara-negara Barat dan dijalankan secara Barat, yaitu Demokrasi Liberal (Parlemen). Tetapi, kemampuan menggunakan dan menumbuhkan bentuk demokrasi itu tidaklah sama di tiap kelompok masyarakat. Selain itu, hasil yang diperoleh dari kehidupan bernegara akhirnya berlainan dari satu kelompok dengan kelompok lainnya. Akibatnya, ada pihak yang merasa tidak ada gunanya Demokrasi Liberal dilaksanakan di Indonesia. Lalu dicarilah bentuk-bentuk demokrasi yang lain. Bung Karno mencoba dengan Demokrasi Terpimpin. Lalu Orde Baru mencari bentuk lain, yaitu Demokrasi Pancasila. Jadi, itu semua adalah akibat dari kenyataan bahwa demokrasi yang sedang dikembangkan dirasa tidak memenuhi kebutuhan (Isre, Ed., 1998:185-186).

Abdurrahman Ad-dhakil, demikian nama lengkap Abdurrahman Wahid atau yang kerap dipanggil Gus Dur, merupakan salah satu tokoh penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Abdurrahman Wahid dikenal sebagai seseorang yang pro demokrasi, disebabkan oleh salah satu *concern* pandangannya tentang demokrasi. Berdasarkan kutipan Abdillah (dalam Rodli dan Salim, Eds., 1999:200), Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia bukanlah seperti demokrasi yang dianut negara-negara Barat. Melainkan demokrasi yang disesuaikan dengan nilai-nilai budaya yang berkembang di Indonesia. Abdurrahman Wahid menyesuaikan konsep demokrasi dengan budaya Indonesia yang tidak bisa dipisahkan dengan ajaran Islam sebagai *rahmat li al-âlamîn* (rahmat bagi seluruh umat manusia).

Abdurrahman Wahid merupakan keturunan ulama besar sekaligus pendiri Nadhlatul Ulama (NU). Abdurrahman Wahid lahir dan berkembang dalam tradisi pesantren, dimana terdapat relasi yang unik antara kyai dengan santri yang disebut hubungan *patron-client*. Menurut Dhofier (dalam Rosyadi, 2004:142-143), kyai memiliki otoritas dan kekuasaan mutlak dalam pesantren. Tidak seorangpun dapat melawan kyai kecuali kyai lain yang memiliki kekuasaan dan otoritas yang lebih besar. Kyai menempati kedudukan yang paling tinggi dari unsur-unsur lain yang ada di lingkungan pesantren. Sedangkan santri berkewajiban membalas budi dengan memberikan dukungan dan bantuan

secara umum, termasuk pelayanan-pelayanan kepada kyai. Hal ini menandakan bahwa mobilisasi dalam pesantren bersifat tertutup. Bila melihat dari latar belakang Abdurrahman Wahid yang berangkat dari kehidupan pesantren yang religius, maka tidak mungkin Abdurrahman Wahid memiliki pemikiran tentang demokrasi. Secara kasat mata, kedua hal tersebut sangat berbeda dan saling bertentangan. Tradisi pesantren bersifat menghambat atau bahkan menutup kemungkinan bagi santrinya untuk memperoleh kebebasan seperti yang ditawarkan demokrasi.

Ayah Abdurrahman Wahid, yakni Kyai Wahid Hasyim adalah menteri agama pertama Indonesia era Soekarno. Kakek Abdurrahman Wahid yang juga ayah dari Kyai Wahid, yakni Kyai Hasyim Asy'ari adalah pendiri Nadhlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia (Al-Zastrouw, 1999:13). Berdasarkan hal tersebut, Abdurrahman Wahid mewarisi masa dari ayah dan kakeknya yang merupakan *the founding fathers*. Abdurrahman Wahid memiliki tanggung jawab moral untuk menyejahterakannya, sedangkan kesejahteraan rakyat hanya dapat dicapai dengan demokrasi. Namun, dengan mencetuskan pemikiran tentang demokrasi, maka Abdurrahman Wahid menunjukkan perilaku yang berseberangan dengan kultur atau tradisi yang membesarkannya. Selain itu, posisinya sebagai *decision maker* (pembuat keputusan) yang memiliki kekuatan massa besar tidak menyurutkan keberanian, kekuatan, dan keyakinan Abdurrahman Wahid dalam mengemukakan pikirannya. Meski mendapat tekanan keras dari berbagai pihak, terutama melawan penguasa (pemerintah) dan orang-orang yang berpikiran sempit, Abdurrahman Wahid tetap gigih memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, tidak hanya mengemukakan ide, tetapi berusaha mewujudkannya melalui sikap.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi, bentuk pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi, serta perjuangan Abdurrahman Wahid untuk mewujudkan pemikirannya tentang demokrasi. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi, menganalisis bentuk pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi, serta menganalisis perjuangan Abdurrahman Wahid untuk mewujudkan pemikirannya tentang demokrasi. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan atau pengetahuan pemahaman tentang tokoh Abdurrahman Wahid dan

pemikirannya tentang demokrasi, serta membantu membentuk pendidikan karakter dalam pembelajaran sejarah.

TINJAUAN LITERATUR

Tinjauan literatur dalam penelitian ini menunjukkan deskripsi tentang perjalanan tokoh Abdurrahman Wahid dalam dunia perpolitikan di Indonesia dan deskripsi tentang konsep demokrasi secara umum. Pembahasan dari penelitian ini akan dijabarkan dalam bab-bab sebagai berikut.

Abdurrahman Wahid

KH. Abdurrahman Wahid lahir di Denanyar, Kota Jombang, Jawa Timur, pada tanggal 7 September 1940. Abdurrahman Wahid merupakan anak dari KH. Abdul Wahid Hasyim (Kyai Wahid). Kyai Wahid adalah anak dari *Hadratusy Syaikh* KH. Muhammad Hasyim Asy'ari (Kyai Hasyim), pendiri Pesantren Tebuireng, Jombang. Sementara ibunya, Nyai Hj. Siti Salekhah merupakan anak dari KH. Bisri Syamsuri (Kyai Bisri). Baik Kyai Hasyim dan Kyai Bisri, serta KH. Wahab Chasbullah, sebagai sepupu Kyai Hasyim merupakan *founding fathers* NU (Wahid, 1999a:27).

Abdurrahman Wahid pertama kali muncul sebagai tokoh populer dalam pentas nasional dengan pemikiran-pemikiran briliannya pada tahun 1970, ketika dirinya aktif dalam lembaga-lembaga sosial, LSM, dan forum-forum diskusi. Abdurrahman Wahid awalnya bergabung dengan kegiatan Lembaga Pengkajian Pengetahuan, Pendidikan, Ekonomi, dan Sosial (LP3ES), kemudian mendirikan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) yang dimotori oleh LP3ES. Pada Tahun 1980 Abdurrahman Wahid mulai banyak terlibat dalam kepemimpinan NU, sebagai wakil khatib syuriah NU. Pada tahun 1983 Abdurrahman Wahid menjadi ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ). Abdurrahman Wahid juga menjadi ketua juri dalam Festival Film Indonesia (FFI) tahun 1986 dan 1987. Kepopuleran Abdurrahman Wahid semakin meningkat ketika tahun 1984, dirinya terpilih menjadi ketua PBNU melalui Mukhtamar NU ke-27 di Situbondo. Jabatan tersebut kembali dikukuhkan pada mukhtamar ke-28 di Yogyakarta (1989), dan mukhtamar di Cipasung, Jawa Barat (1994) dan baru dilepaskan pada Mukhtamar NU ke-30 di Lirboyo, Kediri (Salleh dan Yusuf, 2014:265). Pada masa kepemimpinannya,

Abdurrahman Wahid membawa NU dalam suasana dinamis, penuh nuansa wacana dan kritik. Gus Dur juga semakin keras mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat (Sugiarto, 2010:37). Pada tahun 1999, saat situasi negara yang labil akibat krisis ekonomi dan saat reputasi Indonesia merosot tajam di dunia Internasional akibat kerusuhan sosial diberbagai daerah seluruh Indonesia, Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden RI ke-4. Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden dan Megawati Soekarno Putri sebagai wakil presiden melalui lobi-lobi antar anggota DPR/MPR (Mirza, 2010:23-29).

Abdurrahman Wahid merupakan figur yang fenomenal dalam realitas sosial politik masyarakat Indonesia. Keberaniannya menentang arus tindakan masyarakat yang tidak sesuai dengan gagasan dan pikirannya serta kesetiiaannya pada gagasan, komitmennya pada Islam dan nilai-nilai kebangsaan menjadikannya sebagai tokoh yang populer dan disegani sekaligus dimusuhi dan dicaci. Kepopulerannya sebagai penulis jurnal Prisma, Tempo, dan Kompas membawa Abdurrahman Wahid menjadi salah satu pemikir yang mewakili generasi awal pemikiran Islam neo-modernisme di Indonesia (Prachya, 2013:35). Abdurrahman Wahid telah menulis ratusan artikel di berbagai media massa, baik di Indonesia maupun luar negeri. Menurut Greg Barton (dalam Salleh dan Yusuf, 2014:272-273), karya tulis Abdurrahman Wahid dibagi dalam dua era. Era 1970 hingga akhir 1977, Abdurrahman Wahid memfokuskan tulisannya pada kehidupan pesantren. Tulisan-tulisan tersebut telah dibukukan dalam “Bunga Rampai Pesantren” (1979). Era kedua dimulai pada tahun 1978-1981, Abdurrahman Wahid menulis buku “Muslim di Tengah Pergumulan” (1981). Karya Abdurrahman Wahid selanjutnya adalah buku “Kyai Nyentrik Membela Pemerintah”, “Tuhan tidak Perlu Dibela”, “Prisma Pemikiran Gus Dur”, dan “Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan”. “*Islam, the State and Development in Indonesia*” (Islam, Negara dan Pembangunan di Indonesia) dan “*Ethical Dilemmas of Development in Asia*” (Dilema Etis Pembangunan di Asia) adalah karya Abdurrahman Wahid dalam bahasa Inggris (Sugiarto, 2010:33).

Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demos* dan *kratos*. *Demos* berarti rakyat, sedangkan *kratos* berarti pemerintahan. Berdasarkan arti kata tersebut, dapat

disimpulkan bahwa demokrasi berarti pemerintahan rakyat, yakni suatu pemerintahan dimana rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan (Sufianto, 2015:87). Demokrasi didefinisikan sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Artinya, kekuasaan berasal dari rakyat, karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang menyelenggarakan kehidupan kenegaraan (Asshiddiqie, 2005:241).

Negara berdasarkan prinsip demokrasi, menurut Hans Kelsen (dalam Thalbah, 2009:421) memerlukan rakyat yang bersepakat mengenai makna demokrasi, paham akan cara kerja demokrasi dan kegunaannya bagi kehidupan. Demokrasi yang kuat bersumber pada kehendak rakyat dan berjuan untuk mencapai kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, demokrasi harus berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat. Artinya, demokrasi mengharuskan pertanggungjawaban secara moral kepada para pemilihnya, bukan terhadap partai politik. Demokrasi juga berarti tersedianya prinsip kebebasan beragama, berpendapat, dan berserikat. Hal ini perlu dilakukan oleh negara-negara yang mengaku sebagai negara yang berdasar agama dengan bentuk pemerintahan monarkhi. Demokrasi juga memuat konsepsi demokrasi, yaitu penyelesaian masalah (konflik) melalui suatu norma yang tidak seluruhnya sesuai dengan kepentingan-kepentingan dari salah satu pihak, tidak juga seluruhnya bertentangan dengan kepentingan-kepentingan pihak-pihak lain.

Sklar (dalam Pasaribu, 2012:151) mengungkapkan bahwa saat ini, terdapat lima model demokrasi, yaitu:

- 1) demokrasi liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang ditentukan;
- 2) demokrasi terpimpin, yaitu pemerintahan yang sangat mempercayai pemimpinnya. Namun pemimpin tersebut menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan;
- 3) demokrasi sosial, yaitu demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik;
- 4) demokrasi partisipasi, yaitu pemerintahan yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai;

5) demokrasi konstitusional, yaitu pemerintahan yang menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerjasama yang erat diantara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.

Sedangkan dari segi pelaksanaannya, demokrasi yang dimaksudkan terdiri dari dua model, yaitu:

- 1) demokrasi langsung (*direct democracy*), adalah demokrasi yang terjadi apabila rakyat mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara dilakukan secara langsung. Misalnya, pemilihan pejabat eksekutif (presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan walikota) dan pemilihan anggota parlemen atau legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) dilakukan rakyat secara langsung melalui pemilu;
- 2) demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*), yaitu demokrasi yang terjadi apabila dalam mewujudkan kedaulatan rakyat tidak secara langsung berhadapan dengan pihak eksekutif, melainkan melalui lembaga perwakilan. Dengan demikian, demokrasi tidak langsung disebut juga dengan demokrasi perwakilan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Langkah-langkah metode penelitian sejarah terdiri dari empat tahap, yaitu: (1) heuristik, (2) kritik, (3) interpretasi, (4) historiografi (Gottschalk, 1985:32). Heuristik, peneliti mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Demokrasi Tahun 1974-2001. Pada penelitian ini, sumber atau data yang digunakan peneliti berasal dari sumber tertulis (dokumen) yang berupa sumber primer dan sumber sekunder. Peneliti mengumpulkan sumber primer dari dokumen atau buku yang ditulis oleh pelaku sejarah atau seseorang yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya, terutama tulisan Abdurrahman Wahid. Sedangkan sumber sekunder yang diperoleh berupa buku penunjang yang ditulis oleh siapapun yang tidak hadir pada peristiwa yang ditulisnya, serta data-data yang tidak secara langsung berkaitan dengan fokus penelitian, tetapi masih berkaitan dengan tema penelitian. Kritik, kritik sumber dilakukan secara ekstern dan intern. Setelah mengkritik aspek luar (ekstern) sumber dan isi sumber (intern), maka peneliti memperoleh fakta sejarah dari data-data yang telah diseleksi dan dibandingkan.

Pada tahap interpretasi, peneliti berusaha menetapkan makna yang saling berhubungan antara fakta-fakta yang telah dihimpun. Fakta satu dengan fakta lainnya kemudian dirangkai dan dihubungkan sehingga menjadi suatu cerita sejarah yang sistematis dan logis mengenai pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi. Lalu peneliti menafsirkan substansi dari gagasan-gagasan yang telah dikemukakannya. Historiografi, peneliti menyusun hasil interpretasi dari fakta-fakta sejarah, sehingga menjadi suatu kisah yang kronologis, selaras, mudah dipahami, dan dapat dibuktikan kebenarannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan faktor-faktor yang melatarbelakangi pemikiran Abdurrahman Wahid, bentuk pemikiran Abdurrahman Wahid, hingga upaya-upaya yang dilakukannya dalam membangun demokrasi di Indonesia selama aktif dalam kancah perpolitikan di Indonesia hingga menduduki jabatan presiden. Pembahasan dari penelitian ini akan dijabarkan dalam bab-bab sebagai berikut.

Kondisi Sosial-Budaya, Pendidikan, dan Politik yang Mempengaruhi Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Demokrasi

Abdurrahman Wahid merupakan anak dari KH. Abdul Wahid Hasyim (Kyai Wahid) serta cucu dari KH. Muhammad Hasyim Asy'ari (Kyai Hasyim) dan KH. Bisri Syamsuri (Kyai Bisri) (pendiri NU). Abdurrahman Wahid hidup dalam *setting* lingkungan pesantren (santri-sunni) yang terbiasa dengan kehidupan agama yang penuh dengan etika moral dan larangan penuh untuk mengutarakan gagasan dan keinginan bagi para santrinya (Hadi, 2015:187-188). Namun, menurut Al-Brebesy (dalam Wahid, 1999:34-35), orang tua Abdurrahman Wahid mendidik anak-anaknya dengan demokratis dan menjauhi pendidikan otoriter. Pola pendidikan yang diterapkan adalah selalu berpikir terbuka dan menanyakan sesuatu secara logis dan intelektual. Toleransi juga sangat terasa di lingkungan keluarganya, dibuktikan dengan setiap anggota keluarga bebas memilih karir yang diinginkan. Pendidikan keluarga yang bersifat toleran, terbuka, dan demokratis tersebut, membentuk pribadi Abdurrahman Wahid menjadi seseorang yang lebih mudah menerima

perbedaan dalam masyarakat. Abdurrahman Wahid juga tetap memberi ruang gerak bagi pemikiran lain, seperti pemikiran Barat.

Abdurrahman Wahid dikenal sebagai seorang yang cerdas dan penuh potensi. Salah satu aspek yang membentuk potensinya adalah pendidikan formal yang ditempuhnya. Pada tahun 1949, ketika tinggal di Jakarta, Abdurrahman Wahid masuk ke SD KRIS sebelum pindah ke SD Matraman Perwari. Setelah menamatkan sekolah dasar, Abdurrahman Wahid melanjutkan pendidikannya di SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama) di Jakarta selama satu tahun. Pada masa itu pula Abdurrahman Wahid belajar bahasa Inggris. Karena kemampuannya yang baik dalam berbahasa Inggris, Abdurrahman Wahid mampu membaca buku-buku berbahasa Inggris, seperti karya Ernest Hemingway, John Steinbach, Marx, filsafat Plato, Thales, dan beberapa karya penulis Rusia, seperti Pushkin, Mikhael Sholokov, serta Lenin. Literatur para pemikir Islam yang mempengaruhi Abdurrahman Wahid antara lain Ali Abd al-Raziq, Ali Syari'ati, M. Said al-Asymawi, dan Hasan Hanafi. Selain membaca buku-buku berbahasa Inggris, Abdurrahman Wahid juga aktif mendengarkan radio *Voice of America* dan BBC London (Hasan, 2015:113-114).

Abdurrahman Wahid pernah menggambarkan tentang jati dirinya sebagai kader pesantren, kader yang lahir, dibesarkan, dan dididik dengan pendidikan pesantren. Semula Abdurrahman Wahid diajarkan dasar-dasar agama dan belajar membaca Al-Quran dengan aturan (*tajwid*) yang benar oleh kakeknya, Kyai Hasyim. Setelah tamat Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) tahun 1957, Abdurrahman Wahid dikirim ibunya ke Yogyakarta untuk belajar pada KH. Ali Mas'hum di Pesantren Krapyak. Abdurrahman Wahid terbiasa membaca buku-buku berbahasa asing dan sering menonton pertunjukan wayang kulit sebagai bagian dari kecintaannya terhadap budaya luhur nusantara (Al-Zastrouw, 1999:14-15). Barton dan Fealy (dalam Sugiarto, 2010:34-35) menjelaskan bahwa beberapa tahun kemudian, Abdurrahman Wahid meneruskan pendidikan keagamaannya di pesantren milik Kyai Khudori, yaitu Pesantren Tegalrejo, Magelang. Abdurrahman Wahid banyak menghabiskan waktu membaca buku-buku Barat. Kyai Khudori telah menanamkan kekayaan batin yang mendalam pada diri Abdurrahman Wahid karena mengenalkan ritus dan praktek mistik dalam tradisi Islam Jawa. Praktek-praktek ini akhirnya membentuk keunikan tersendiri baginya, yakni dengan menggabungkan studi keislamannya dan tradisi lokal (*local knowledge*) budaya Jawa yang luhur.

Tahun 1964-1971, Abdurrahman Wahid berkesempatan melanjutkan studi ke Kairo, kemudian diteruskan di Baghdad, lalu dilanjutkan ke Eropa (Mirza, 2010:5-14). Selama di luar negeri, Abdurrahman Wahid berkesempatan mengenal budaya dan pemikiran-pemikiran Eropa, mempelajari sastra Arab, filsafat, dan teori sosial Eropa. Selama tiga tahun di Baghdad Abdurrahman Wahid juga belajar bahasa Perancis di Pusat Kebudayaan Perancis. Pada waktu yang sama, Abdurrahman Wahid kembali bersentuhan dengan buku-buku karya sarjana orientalis Barat (Barton, 2002:98-100).

Perpaduan antara pendidikan pesantren, pendidikan Timur Tengah, dan pendidikan Barat yang dijalankannya, membentuk karakter Abdurrahman Wahid yang dinamis, liberal, modern, dan sangat peka terhadap sentuhan-sentuhan kemanusiaan. Keintelektualitasannya membawa Abdurrahman Wahid menjadi sosok intelektual Muslim modern (disebut aliran neo-modernisme) yang berwawasan luas dan dapat berkomunikasi dengan semua kekuatan bangsa serta pemikirannya selalu tertuju pada kesejahteraan rakyat. Para intelektual neo-modernisme (termasuk Abdurrahman Wahid) inilah yang mengawali *discourse* tentang demokrasi di Indonesia.

Abdurrahman Wahid lahir pada masa perjuangan kemerdekaan. Hal ini menandakan bahwa Abdurrahman Wahid menjalani fase Demokrasi Parlemen (1945-1957), Demokrasi Terpimpin (1957-1965), Demokrasi Pancasila (1965-1998), dan Demokrasi Liberal (1998-sekarang). Perubahan dan fluktuasi penerapan demokrasi tersebut disebabkan karena demokrasi hadir ditengah ketidakpastian stabilitas kekuasaan. Pada kenyataannya, demokrasi terasa sangat dekat dengan rakyat, namun adakalanya demokrasi justru menjauhkan diri dari rakyat (Djamra, 2012:1).

Pada masa Demokrasi Parlemen, Presiden Sukarno ditempatkan sebagai penguasa simbolik, sementara kekuasaan pemerintah yang *riil* dimiliki oleh perdana menteri, kabinet, dan parlemen. Sistem multipartai yang diterapkan pemerintah menyebabkan terciptanya golongan mayoritas dan minoritas dalam masyarakat, serta adanya sikap mementingkan kepentingan golongan daripada kepentingan bersama. Hal tersebut mengakibatkan penyempitan proses politik yang bermuara pada kelompok elit, rakyat terasingkan dan terpinggirkan dari proses politik (Hakiki, 2011:14). Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, terjadilah peralihan Demokrasi Parlemen kepada Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terpimpin diawali dengan berubahnya peta distribusi kekuasaan. Pada masa Demokrasi Terpimpin, kekuasaan menjadi terpusat di tangan presiden dan diimbangi oleh peranan PKI dan Angkatan Darat. Meskipun rakyat ingin terlibat aktif dalam kehidupan kenegaraan, namun infrastruktur politik dikendalikan sepenuhnya oleh presiden. Peristiwa G30S tahun 1965 akhirnya menjadi malapetaka politik bagi keberlangsungan Demokrasi Terpimpin. Berakhirnya Demokrasi Terpimpin, maka kekuasaan dan demokrasi beralih kepada Soeharto dengan Demokrasi Pancasila. Soeharto melakukan konsolidasi ideologi Pancasila. Soeharto tidak gentar untuk menumpas lawan politiknya yang berideologi non-Pancasila seperti PKI (Djamra, 2012:4-6).

Pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan alat untuk merusak apa pun yang dapat mengganggu monopoli kekuasaannya. Atas nama Pancasila, dirusaklah komunisme, “Islam politik”, serta segala usaha untuk membendung kesewenangan Orde Baru yang mengacu pada demokrasi dan hak asasi manusia. Demokrasi Pancasila sendiri tidak lebih daripada akal untuk menghindar dari tuntutan pertanggungjawaban demokratis (Magnis dan Suseno, 2006:176). Masyarakat dihindarkan dari persoalan-persoalan politik, terlebih lagi kepercayaan terhadap partai politik kian surut. Pemerintah Orde Baru yang bersifat otoriter-birokratis justru mencederai demokrasi. Depolitisasi massa lapis bawah, korporatisasi negara terhadap organisasi sosial dan politik, monopoli kekuasaan eksekutif, personalisasi kekuasaan, dan lemahnya lembaga legislatif dan yudikatif sebagai pengontrol kekuasaan keberpihakan ABRI (TNI dan Polri) dalam politik praktis, telah menyengsarakan kehidupan masyarakat dan tidak berpihak pada rakyat. Sikap negara kala itu kurang memiliki kepekaan terhadap kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (Hikam, 2000:122).

Abdurrahman Wahid termasuk orang yang gelisah melihat situasi tersebut, situasi yang sengaja melemahkan semangat demokrasi. Kegelisahan itu tidak lepas dari komunitas yang mewadahnya, yakni NU. Sejak awal masa pemerintahan Indonesia, NU yang sebagian besar anggotanya adalah massa Islam tradisional yang tinggal di pedesaan terus mengalami proses “peminggiran” dan “penciutan” peran politik (‘Ulum, 2002:58). Konflik-konflik ideologis yang pernah terjadi antara berbagai kelompok politik aliran tampaknya menjadi pengalaman penting bagi pemerintah untuk mendesain sistem politik baru. Akhirnya muncul pemikiran untuk merancang sistem politik baru yang berupaya

mengeliminasi kelompok santri, terutama golongan santri tradisional (NU). pemerintah menyiapkan berbagai paket kebijaksanaan politik untuk mengkarantina kiprah politik NU, mulai dari *floating mass* (massa mengambang), fusi partai, sampai asas tunggal. Keputusan NU untuk kembali ke *Khittah* 1926 juga semakin memperkecil ruang gerak politik NU (Aldjufri, 1997:5-7). Untuk mengakhiri berbagai penyimpangan dan perilaku diskriminasi yang dilakukan pemerintah terhadap rakyat, maka Abdurrahman Wahid mencetuskan gagasan tentang demokrasi.

Bentuk-Bentuk Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Demokrasi

Demokrasi sosial dalam pandangan Abdurrahman Wahid berkaitan dengan masyarakat pluralis (*social pluralism*). Demokrasi berarti pengakuan akan adanya perbedaan, karena masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai golongan dan kelompok, besar-kecil, bahkan bertentangan, baik suku, agama, keyakinan, kelompok kepentingan, maupun pengelompokan dengan dasar lainnya, yang sama-sama berhak untuk dipertimbangkan aspirasinya dalam mengambil keputusan politik (Wahid, 1999:218). Proses demokrasi tidak cukup hanya disalurkan dalam lembaga-lembaga negara saja. Hak rakyat untuk menyatakan dan menyatukan pendapatnya secara langsung tetap merupakan bagian penting dalam mekanisme demokrasi. Sehingga perlu untuk memperluas ruang bagi terjadinya wacana publik yang bebas (Al-Zastrouw, 1999:254). Kontroversi atau perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar terjadi. Negara yang demokratis seharusnya memberikan tempat untuk rakyat melakukan proses argumentasi yang sehat dan terbuka, tanpa membedakan mayoritas maupun minoritas. Negara yang mengajukan klaim sebagai negara demokratis, namun tidak diperbolehkan menyatakan pendapat secara bebas, maka yang berlaku di tempat itu adalah demokrasi prosedural, bukan demokrasi sesungguhnya (Wahid, 2006:125).

Bagi Abdurrahman Wahid, penegakan hak asasi manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam, sehingga komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan wajib hukumnya. Islam sebagai pandangan dunia maupun pikiran-pikiran dasar, meletakkan kerangka dasar bagi pandangan dunia kemanusiaan yang luar biasa. Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk dengan kedudukan tertinggi di bumi. Sejak lahir manusia telah memiliki hak-hak yang melekat dalam dirinya. Manusia

diharapkan dapat menggunakan hak-hak tersebut untuk mengelola alam semesta dengan bijaksana untuk mewujudkan hak asasinya, seperti hak memperoleh perlindungan hukum, keadilan perlakuan, penyediaan kebutuhan pokok, pendidikan, kebebasan untuk menyatakan pendapat, keyakinan dan keimanan, serta berserikat dan berusaha (Barton, 1999:407-408).

Wacana demokrasi dan hak asasi dalam prakteknya memang selalu berkaitan. Negara yang demokratis memungkinkan tegaknya Hak Asasi Manusia. Sebaliknya, penghargaan terhadap hak asasi yang tinggi menandakan bahwa proses demokratisasi berjalan dengan baik. Komitmen Abdurrahman Wahid dalam upaya menegakkan hak asasi manusia dibuktikan dengan pembelaannya terhadap kaum minoritas yang termarginalisasikan baik oleh negara maupun masyarakat sendiri, seperti salah satu pembelaannya terhadap warga Tionghoa (Wahid, 2006:152-153).

Indonesia sebagai bangsa yang plural (majemuk) tidak hanya dihuni oleh warga negara Muslim, tetapi juga warga negara non-Muslim. Keinginan kelompok-kelompok Islam radikal untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) merupakan bentuk pengingkaran terhadap persamaan kedudukan semua warga negara di muka hukum sebagai esensi demokrasi. Mendirikan negara Islam berarti menjadikan warga negara non-Muslim sebagai warga kelas dua (Wahid, 2006:50). Islam sebagai agama mayoritas harus transformatif dalam menjawab tantangan realitas kehidupan. Islam ditempatkan sebagai etika sosial yang sesuai dengan budaya bangsa, bukan menjadikan Islam dalam formalisasi kenegaraan. Formalisasi Islam dalam negara hanya akan berakibat pada kecilnya penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sehingga apabila ingin menjalankan demokrasi, maka wajib hukumnya untuk menegakkan hak asasi manusia, seperti yang dilakukan Abdurrahman Wahid dalam membela warga Tionghoa yang termarginalisasi oleh negara. Untuk merealisasikannya, Islam harus mengembangkan watak dinamis, sehingga dapat memberikan pemecahan bagi persoalan-persoalan aktual yang dihadapi masa kini (Wahid, 2000:39).

Demokratisasi dalam bidang politik hanya dapat tegak apabila diupayakan berlakunya kedaulatan hukum dan adanya perlakuan yang sama bagi semua warga negara di muka undang-undang (Wahid, 2006:40-41). Kedaulatan hukum perlu diperjuangkan seluruh komponen masyarakat agar kebutuhan minimal masyarakat yang berupa

terpenuhinya kebutuhan pokok sehari-hari bagi ‘orang kecil’. Sebaliknya, jika kebutuhan minimal tidak dapat dijamin, maka orang akan mencari “jalan pintas”: korupsi, manipulasi, dan pelanggaran. Hukum bukan hanya alat untuk mewujudkan ketertiban tetapi membawa keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya (Sugiarto, 2010:46).

Fungsi *check and balance* perlu dilaksanakan untuk menjamin nilai-nilai demokrasi dapat terlaksana dengan serasi. Sistem politik yang demokratis memerlukan transparansi dalam pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pertimbangan wewenang antara pihak eksekutif dan legislatif dalam mengambil keputusan, yang diimbangi oleh wewenang menguji kebenaran dengan UUD oleh pihak peradilan, merupakan alat kolektif untuk pengambilan keputusan di tingkat demokrasi yang telah matang. Para anggotanya harus dipilih dari golongan fungsional, guna menguntungkan kelompok-kelompok minoritas ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang dicapai melalui prosedur musyawarah untuk mufakat, sehingga kalangan minoritas turut serta memutuskan jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara (Wahid, 2006:219).

Pengangkatan kepala daerah harus diubah sistem dan mekanismenya, yakni tidak ditentukan oleh pemerintah pusat, tetapi ditentukan secara mandiri oleh daerah masing-masing. Pemerintah pusat hanya menjadi wasit dan penjaga konstitusi dalam praktek pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Pegawai negeri akan dibagi dua, pegawai negeri pusat dan pegawai negeri daerah, supaya dapat bekerja secara efisien dan efektif. Pemerintah pusat memiliki otoritas penuh dalam politik luar negeri dan pertahanan. Daerah-daerah harus ikut saja dalam keputusan pusat. Masalah keamanan diserahkan pada kepolisian negara yang tunduk pada gubernur, walikota, dan bupati, bukan pada pemerintah pusat. TNI cukup mempersiapkan diri secara profesional dalam mengurus pertahanan negara. Pada pemilihan pemerintah daerah, pemerintah pusat hanya berfungsi menetapkan standar yang diikuti oleh pemerintah-pemerintah daerah, disertai dengan pengawasan yang teliti dari pihak yudikatif (Wahid, 1999:222-223).

Demokrasi ekonomi berisi tentang keterbukaan terhadap akses pada sumber-sumber daya ekonomi. Visi ekonomi Abdurrahman Wahid menurut Tjakrawerdaja (dalam Rodli dan Salim, Eds., 1999:119) adalah pengelolaan ekonomi melalui cara yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat banyak, sebagaimana ditegaskan dalam ajaran Islam (*fiqh*). Artinya, proses ekonomi yang berlangsung harus transparan dan adil, tanpa unsur

monopolistik. Sehingga kegiatan ekonomi dapat membuahkan kesejahteraan bagi rakyat banyak dalam bentuk terpenuhinya kebutuhan rakyat akan sandang papan pangan, pendidikan, kesehatan, kesempatan bekerja dan berusaha, peluang meningkatkan kualitas diri, serta indikator kesejahteraan lainnya. Upaya menyejahterakan rakyat banyak merupakan bagian dari perjuangan Islam, karena memiliki persamaan dengan prinsip *maslahah* dalam Islam.

Jalinan antara kesejahteraan dan keadilan sangat penting sebagai salah satu persyaratan demokrasi. Prasyarat yang harus dipenuhi adalah terciptanya demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan. Cara mengembangkan ekonomi rakyat adalah dengan memperluas dan mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Usaha besar dibiarkan berdiri sendiri tanpa pertolongan pemerintah dan tanpa memperoleh keistimewaan apapun. Selain itu, tetap berpegang pada persaingan bebas, efisiensi, dan permodalan swasta dalam dan luar negeri (Wahid, 2006:178-179).

Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta proses demokratisasi yang memberikan ruang yang luas bagi partisipasi rakyat dalam proses pembangunan sekaligus menikmati hasil pembangunan itu sendiri perlu dikembangkan. Pemerataan pembangunan juga perlu diciptakan dalam pola interaksi antara pemerintah pusat dan daerah. Misalnya dalam hal pembagian devisa antara pusat dan daerah, 70% diperuntukkan bagi daerah asal yang menghasilkan devisa dan 30% untuk pemerintah pusat. Penghasilan itu ditambah penghasilan pusat dari pendapatan non-ekspor (pajak, cukai, dan sebagainya) cukup untuk membiayai pemerintah pusat dan daerah-daerah miskin (Wahid, 1999:222).

Perjuangan Abdurrahman Wahid untuk Mewujudkan Pemikirannya tentang Demokrasi

Abdurrahman Wahid (dalam Afandi, Ed., 1996:121; Rodli dan Salim, Eds., 1999:46; dan Hikam, 2000:189) menyatakan perlunya mengupayakan proses demokratisasi di segala sisi kehidupan melalui strategi ganda. Kombinasi kedua pendekatan kultural dan politis dapat menegakkan proses demokratisasi di Indonesia. Strategi ganda dilakukan dengan menampilkan Islam dalam kesadaran hidup sehari-hari, serta proses formalisasi agama dalam kehidupan bernegara melalui cara-cara dan produk-produk yang diperjuangkan oleh pemerintah.

Abdurrahman Wahid menggunakan pendekatan kultural karena melihat karakteristik masyarakat Indonesia yang plural. Masyarakat modern yang demokratis dapat diwujudkan dengan cara menciptakan masyarakat toleran yang menghargai pluralitas. Segala bentuk gerakan sektarianisme harus dihindari guna mencegah disintegrasi bangsa. Gerakan kultural menyangkut nilai-nilai dalam masyarakat, sehingga tergantung pada perkembangan masyarakat dan kebutuhan-kebutuhan lokal. Gerakan kultural bersifat lebih halus (*soft*), misalnya menciptakan tradisi demokrasi, menumbuhkan kepekaan terhadap ketidakadilan, kesewenangan rezim, menciptakan pemikiran politik yang baru dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Perilaku demokratis baik dari pemimpin rakyat hingga rakyat yang diperjuangkan Abdurrahman Wahid, bukan lembaga politik yang menjadi tolok ukur berjalannya demokrasi (Sugiarto, 2010:9-10). Menurut Bisri (dalam Afandi, Ed., 1996:50), perjuangan kultural ini juga disebut dengan “demokrasi bawah”. Abdurrahman Wahid meyakini bahwa demokrasi harus diperjuangkan dari bawah. Keyakinannya tersebut lebih berorientasi kepada para pengikutnya (warga NU) yang mayoritas adalah orang-orang pedesaan yang berhak diberi porsi sama besar untuk bersuara atau menyuarakan keinginannya. Adapun beberapa usaha Abdurrahman Wahid melalui strategi kultural, antara lain, pengembangan *civil society* melalui NU, penolakan Abdurrahman Wahid untuk masuk menjadi anggota ICMI, serta mendirikan Forum Demokrasi.

Perjuangan struktural disebut juga *high politics* yang berdasarkan otoritas elite. Jika perjuangan kultural lebih kepada pemberdayaan politik sebagai kontrol atas proses demokratisasi yang datang dari kelompok *civil society* dan berperan dalam mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, maka perjuangan struktural selalu dikaitkan dengan konsep, ide bahkan jabatan, dan akuisisi kekuasaan, serta bagi-bagi kekuasaan (Sugiarto, 2010:41). Pentingnya perjuangan struktural juga diungkapkan Rais (dalam Afandi, Ed., 1996:122), bahwa perjuangan politik umat Islam untuk membangun masyarakat lebih baik harus diberikan kepada rakyat dan aspirasi dari rakyat harus mengejawantah didalam kehidupan eksekutif dan legislatif (pemerintah), maka *government representativeness* menjadi sangat penting. Setelah menjadi presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid mengubah strategi perjuangannya menjadi strategi struktural. Adapun beberapa usahanya, antara lain, mencabut kebijakan tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), membubarkan

Departemen Departemen Sosial dan Departemen Penerangan, mencabut TAP MPRS/XXV/1966 tentang larangan terhadap PKI dan ajaran komunisme/marxisme-leninisme di Indonesia, serta penetapan Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000 tentang pencabutan Instruksi Presiden No. 14 tahun 1967 yang membatasi aktifitas keagamaan dan adat istiadat Cina.

Usaha Abdurrahman Wahid dalam menegakkan demokrasi tidaklah mudah, karena pemerintahannya mewarisi berbagai krisis dari pemerintahan sebelumnya, seperti krisis politik, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia memiliki harapan besar bahwa pemerintahan Abdurrahman Wahid dapat memperbaiki berbagai krisis tersebut. Meskipun di awal pemerintahannya, Abdurrahman Wahid berhasil mengatasi krisis yang terjadi, namun hal tersebut tidak berlangsung lama. Saat pemerintahan Abdurrahman Wahid dianggap tidak mampu lagi mengendalikan situasi, kemudian muncul fenomena meningkatnya aksi kekerasan, kerusuhan, dan gejala separatisme. Sepanjang tahun 1999, terjadi aksi unjuk rasa mahasiswa mencapai sekitar 300 peristiwa, seperti desakan untuk mengadili Soeharto dan kroninya, ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan Abdurrahman Wahid, isu kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, dan desakan penyelesaian kerusuhan. Pada tahun 2000, konflik di Papua semakin meningkat dengan diselenggarakannya Kongres Rakyat Papua II dimana Abdurrahman Wahid selaku presiden memperbolehkan pengibaraan bendera Bintang Kejora sebagai simbol negara baru. Konflik di Riau juga memuncak dengan diselenggarakannya Kongres Rakyat Riau (KRR) II yang menghasilkan keinginan untuk merdeka dan menolak penyatuan ke NKRI karena pengelolaan sumber daya alam yang tidak adil, walaupun kongres tersebut dianggap tidak mewakili rakyat Riau (Tim Lesperssi, 2008:9-10).

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. (Ed.). (1996). *Islam Demokrasi Atas Bawah: Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aldjufri, S. (1997). *Politik NU dan Era Demokratisasi Gus Dur*. Surabaya: Lembaga Penerangan dan Laboratorium Islam (LPLI).
- Al-Zastrouw. (1999). *Gus Dur, Siapa Sih Sampeyan? Tafsir Teoritik atas Tindakan dan Pernyataan Gus Dur*. Jakarta: Erlangga.

- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Barton, G. (1999). *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholis Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid*. Jakarta: Paramadina dan Pustaka Antara.
- Barton, G. (2002). *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Yogyakarta: LkiS.
- Djamra, N. S. (2012). *Demokrasi dan Anarkhi: Kebebasan yang Terdistorsi*. Jurnal, 1(2), 1-17.
- Gottschalk, L. (1985). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Hadi, M. K. (2015). *Abdurrahman Wahid dan Pribumisasi Pendidikan Islam*. Jurnal, 12 (1), 183-207.
- Hakiki, P. (2011). *Sistem Pemerintahan pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1949-1959*. Jurnal, 1-15.
- Hasan, A. W. (2015). *Gus Dur: Mengarungi Jagat Spiritual Sang Guru Bangsa*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Hikam, M. A. S. (2000). *Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society*. Jakarta: Erlangga.
- Isre, M. S. (Ed.). (1998). *Tabayun Gus Dur: Pribumisasi Islam, Hak Minoritas, Reformasi Kultur*. Yogyakarta: LKiS.
- Magnis, F. dan Suseno. (2006). *Berebut Jiwa Bangsa*. Jakarta: Buku Kompas.
- Mirza, M. (2010). *Gus Dur Sang Penakluk*. Jombang: Pustaka Warisan Islam.
- Pasaribu, R. B. F. (2012). *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*. http://rowland_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id.
- Pracahya, R. M. (2013). *Konsep K.H. Abdurrahman Wahid tentang Pendidikan Islam Mutikultural*. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Skripsi.
- Rodli, A.F. dan Salim, F. (Eds.). (1999). *Berguru kepada Bapak Bangsa: Kumpulan Esai Menelusuri Jejak Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid*. Jakarta: PP Gerakan Pemuda Ansor.
- Rosyadi, K. (2004). *Mistik Politik Gus Dur*. Yogyakarta: Jendela.

- Salleh, K. dan Yusuf, K.M. (2014). *Gus Dur dan Pemikiran Liberalisme*. Jurnal, 1(2), 259-284.
- Sufianto, D. (2015). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiarto, A. (2010). *Demokrasi dalam Pandangan Abdurrahman Wahid*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Skripsi.
- Thalhah, H. M. (2009). *Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen*. Jurnal, 16(3), 413-422.
- Tim Lesperssi. (2008). *Konflik Domestik Pasca Soeharto*. <http://www.lesperssi.Org/en/publications/papers/11-domestic-politic/11-konflik-domestik-pasca-soeharto>.
- 'Ulum, B. (2002). *"Bodohnya NU" apa "NU Dibodohi"?*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Press.
- Wahid, A. (1999). *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*. Jakarta: PT Grasindo.
- Wahid, A. (2000). *Prisma Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: LKiS.
- Wahid, A. (2006). *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute.